



Hasil Sidang Komisi V:
**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN,
DAN PELINDUNGAN BAHASA**

Depok, 29-31 Maret 2015



TOPIK BAHASAN 1 : Peningkatan kualitas pendidikan bahasa

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)	Unit Kerja/ Stakeholder Terkait
1	Guru BI kurang menguasai metode pengajaran yang inovatif	Penyediaan bahan ajar atau model pembelajaran bahasa Indonesia yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan (<i>fun</i>) bagi peserta didik	Badan Bahasa, Balitbang, Ditjen Guru dan Tendik, Pemda
2	Rendahnya Kompetensi Berbahasa: a. Hasil UN BI rendah dibandingkan mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika b. Hasil PISA c. Rendahnya Literasi siswa d. Rendahnya kemampuan siswa dalam ragam formal	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu kebijakan Menteri untuk menetapkan lembaga yang bertanggung jawab menumbuhkan minat baca tulis2. Perlu gerakan nasional yang sistematis, masif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan sikap positif generasi muda terhadap bahasa Indonesia melalui kecintaan membaca dan menulis3. Perlu supervisi dari instansi resmi kebahasaan untuk menyusun soal-soal UN Bahasa Indonesia	Badan Bahasa, Balitbang, Ditjen Guru dan Tendik, Pemda, Ditjen Dikdasmen

TOPIK BAHASAN 1 : Peningkatan kualitas pendidikan bahasa

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)	Unit Kerja/ <i>Stakeholder</i> Terkait
3.	Mutu bahasa pada bahan ajar kurang terkendali sehingga bahan ajar sulit dipahami oleh anak didik	Perlu intervensi Pemerintah Pusat yang lebih dominan dalam penyusunan buku ajar	Puskurbuk Kemendikbud

TOPIK BAHASAN 2: Diplomasi Bahasa untuk Memperkuat Identitas Indonesia (Internasionalisasi bahasa Indonesia)

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)	Unit Kerja/ Stakeholder Terkait
1.	<p>Penguatan bahasa Indonesia di Dalam Negeri</p> <p>a. pemakaian BI di ruang publik tidak terkendali.</p> <p>b. Pengutamaan bahasa Inggris sebagai persyaratan studi lanjutan S-2 dan S-3 di Indonesia.</p>	<p>1. Penegakan regulasi tentang penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik</p> <p>2. Koordinasi lintas lembaga</p> <p>Pembuatan regulasi untuk menjadikan UKBI sebagai persyaratan studi lanjutan.</p>	Kemendagri, Pemda,

TOPIK BAHASAN 2 : Diplomasi Bahasa untuk Memperkuat Identitas Indonesia (Internasionalisasi bahasa Indonesia)

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)	Unit Kerja/ Stakeholder Terkait
2.	<p>Penguatan bahasa Indonesia di Luar Negeri</p> <p>a. Mempertahankan kesinambungan program pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri.</p> <p>(saat ini terdapat 45 negara/176 lembaga pembelajaran BI di luar negeri)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan kurikulum, silabus, bahan ajar/bahan pengayaan, dan uji kemahiran berbahasa Indonesia. 2. Sertifikasi lembaga/pengajar BIPA 3. Pemberian dukungan dana dan sumber daya manusia (pengajar) bagi penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. 	<p>Kemenlu, Kemenristek Dikti, KBRI, SEAMEO,</p>

TOPIK BAHASAN 2 : Diplomasi Bahasa untuk Memperkuat Identitas Indonesia (Internasionalisasi bahasa Indonesia)

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)	Unit Kerja/ Stakeholder Terkait
		<p>4. Memperkuat keberadaan balai bahasa di tiap negara yang menyelenggarakan pengajaran BIPA</p> <p>5. Memperkuat pengenalan BI pada jenjang prasekolah di luar negeri.</p> <p>6. Memperkuat mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum sekolah di luar negeri</p>	<p>Kemenlu, Kemenristek Dikti, KBRI,</p>

TOPIK BAHASAN 2 : Diplomasi Bahasa untuk Memperkuat Identitas Indonesia (Internasionalisasi bahasa Indonesia)

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)	Unit Kerja/ <i>Stakeholder</i> Terkait
3.	Persaingan dengan bahasa serumpun	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 401 1408 611">1. Penggalangan penulisan artikel akademik tentang bahasa Indonesia pada jurnal linguistik internasional<li data-bbox="749 686 1408 1068">2. Pemberdayaan kalangan Indonesianis (orang asing yang ahli dalam bidang bahasa Indonesia) untuk membantu mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional<li data-bbox="749 1143 1408 1296">3. Pemberian akses kepada para Indonesianis untuk memperdalam bahasa Indonesia di Indonesia	Kemenlu, perguruan tinggi, KBRI

TOPIK BAHASAN 3 : Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)	Unit Kerja/ <i>Stakeholder</i> Terkait
1	Munculnya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang pengaturan kebahasaannya kurang selaras dengan UU Nomor 24 Tahun 2009	Melakukan peninjauan ulang terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait agar tidak tumpang tindih dengan UU Nomor 24 Tahun 2009	DPR, Kemenkum HAM, Kemendagri, Biro Hukor, Balitbang,
2	Munculnya perda di beberapa daerah tentang pemakaian bahasa daerah yang menonjolkan nuansa lokalitas primordial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan ketentuan tentang kedudukan dan fungsi bahasa daerah sesuai kebijakan nasional kebahasaan 2. Penguatan fungsi Balai/Kantor Bahasa untuk menata perda yang tidak selaras dengan kebijakan nasional kebahasaan 	Biro Hukor Kemendikbud , Pemda,
3	Munculnya kegiatan kebahasaan yang sama antara yang dilakukan Balai/Kantor Bahasa dengan SKPD	Mengintegrasikan program SKPD dengan program Balai/Kantor Bahasa	Pemda

TOPIK BAHASAN 4 : Pelindungan Bahasa

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)	Unit Kerja/ <i>Stakeholder</i> Terkait
1	Pelindungan bahasa daerah yang terancam punah	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 401 1406 672">1. Penyusunan model pembelajaran yang menggunakan bahasa ibu untuk pendidikan prasekolah yang homogen<li data-bbox="749 743 1406 843">2. mendokumentasikan bahasa yang terancam punah<li data-bbox="749 915 1406 1015">3. Melakukan Pengkajian bahasa daerah yang terancam punah<li data-bbox="749 1086 1406 1186">4. Melakukan revitalisasi bahasa daerah berbasis komunitas<li data-bbox="749 1258 1406 1358">5. Melakukan konservasi bahasa daerah yang terancam punah	Badan Bahasa, Pemda, LSM, Perguruan Tinggi

TOPIK BAHASAN 4 : Pelindungan Bahasa

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)	Unit Kerja/ Stakeholder Terkait
2.	Pelestarian bahasa daerah dalam posisi aman	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 448 1412 544">1. Mengajarkan bahasa daerah di sekolah<li data-bbox="749 619 1412 715">2. Menerbitkan karya sastra dalam bahasa daerah<li data-bbox="749 791 1412 943">3. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah dalam media cetak dan elektronik<li data-bbox="749 1019 1412 1115">4. Menyusun kamus bahasa daerah<li data-bbox="749 1190 1412 1286">5. Merekam perkembangan dinamis bahasa daerah	Badan Bahasa, Pemda, LSM, Perguruan Tinggi

TERIMA KASIH



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

TIM KOMISI V

Kebijakan Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa

Ketua	Prof. Dr. Mahsun, M. S.
Sekretaris	Dr. Felicia N. Utorodewo
Koordinator Perumus	M. Muhadjir, M.A.
Tim Perumus	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan PP Bahasa.2. Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Badan PP Bahasa.3. Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan PP Bahasa.4. Inspektur Investigasi, Itjen.5. Konsultan Mendikbud Bidang Pengawasan, Daryanto.6. Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Badan PP Bahasa
Anggota Komisi	87 Orang
Anggota Komisi yang Hadir	80 Orang
Tim Subtansi	6 orang

ISU/POKOK BAHASAN

1. **Peningkatan kualitas pendidikan bahasa.**
2. **Diplomasi Bahasa Indonesia untuk Memperkuat Identitas Indonesia.**
3. **Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.**
4. **Pelindungan Bahasa.**